

# PROSPEK PENYELESAIAN KONFLIK KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA

Oleh:

Fahrin Umarama<sup>1</sup>

Michael Mamentu<sup>2</sup>

Trilke E. Tulung<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penyelesaian Konflik Korea Utara dan Korea Selatan yang telah berlangsung selama 65 tahun hingga kini belum menemui jalan penyelesaian yang komprehensif walaupun sudah banyak pihak yang terlibat dan berbagai strategi dan solusi yang diupayakan. Tulisan ini mencoba menggambarkan prospek penyelesaian konflik Korea Selatan dan Korea Utara kedepan yang akan terjadi. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) ini tergambar bahwa berbagai hubungan kerjasama baik bilateral antara Korea maupun multilateral yang telah dilakukan hingga kini belum membawa dampak untuk perdamaian kedua Korea tanpa pengaruh besar Amerika dan Cina. Bahkan hingga kini yang terjadi justru sebaliknya, dimana masa depan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan cenderung akan tetap dalam kondisi konflik dan sangat berpeluang untuk pecah kembali perang besar antara kedua Korea. Hal tersebut disebabkan oleh kepemilikan senjata pemusnah masal antar benua oleh Korea Utara yang telah membuat negara tersebut tidak takut lagi dan tunduk kepada siapapun walaupun telah diberi ancaman dan sanksi bertubi-tubi.

**Kata Kunci: Konflik Korea.**

## ABSTRACT

*The North Korean and South Korean Conflict Resolution which has lasted for 65 years has yet to find a comprehensive solution, even though many parties have been involved and various strategies and solutions have been pursued. This paper tries to describe the prospects of resolving the conflict in South Korea and North Korea in the future. From the results of research using the library research method (library research), it is illustrated that various bilateral and multilateral relations between Korea and the multilateral cooperation that have been carried out up to now have not yet had an impact on the peace of the two Koreas without the great influence of America and China. Even to the contrary, the future of relations between North and South Korea will likely remain in a state of conflict and is very likely to reignite a major war between the two Koreas. This is caused by the ownership of weapons of mass destruction between continents by North Korea which has made the country no longer afraid and submits to anyone despite being threatened and sanctioned repeatedly.*

**Keywords: Korean Conflict**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

## **PENDAHULUAN**

Perang saudara yang melanda semenanjung Korea sejak 65 tahun yang lalu mengantarkan kedua negara Korea pada kondisi yang tidak mudah di era selanjutnya. Kedua Negara tersebut sebelumnya pernah berada dalam satu kesatuan dimasa Pemerintahan Dinasti Choson pada tahun 1392-1910. (Djelantik, S. 2015: 224) Posisi geografi Korea yang strategis, dihipit oleh tiga Negara besar yaitu Cina, Jepang, Uni Soviet dan daerah penghubung Asia Timur Laut dengan dunia luar. Membuat Korea berkali-kali mendapat serangan, terutama dari Jepang yang sebagai Negara dengan kekuatan terbesar di Asia yang selalu berekspansi memperluas daerah jajahannya termasuk ke Korea yang sebagai daerah terdekat. Saat perang Pasifik, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Perjalanan panjang Jepang untuk menguasai Asia terhenti pada 15 Agustus 1945 saat menyerahkan diri atas kekalahannya terhadap Amerika Serikat dan Sekutunya pada Perang Dunia II. Seluruh Negara jajahan Jepang mendeklarasikan kemerdekaannya, termasuk Korea.

Setelah merdeka atas kejatuhan Jepang saat perang Dunia II, membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet merebut wilayah yang pernah di kuasai oleh Jepang. Perebutan Korea dan penyebaran ideologi, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt memutuskan bahwa Korea akan di kelola secara bersama-sama melalui perwakilan multilateral (*multilateral trusteeship*) antara Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat melihat situasi perwalian multilateral ini sebagai cara pintas untuk membendung Uni Soviet dari pengaruhnya di semenanjung Korea. Berhubung perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak membawa hasil hingga Mei 1947, Amerika Serikat menyerahkan masalah Korea ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Majelis Umum PBB mengakui hak Korea untuk mendapatkan kemerdekaannya serta membentuk komisi khusus untuk mengawasi pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1948 dan Sygman Rhee terpilih sebagai Presiden dan membentuk pemerintahan yang mewakili seluruh Korea. Pada bulan Oktober 1948, Majelis Umum PBB mengakui berdirinya *Republic of Korea*, namun Uni Soviet *memveto* untuk mencegah bergabungnya Korea dengan AS. Sehingga mengadakan pemilihan umum sendiri di Korea Utara. Sejak itu, Korea terpisah menjadi dua secara resmi dimana masing-masing menganggap bahwa dirinyalah pemerintah sah Korea. (Martin, 1998: 87)

Saling mengklaim wilayah kekuasaan di semenanjung oleh kedua pemerintahan Korea, sehingga menyebabkan pecahnya perang Korea yang diawali dengan Militer Korea Utara *Korean's People Army* (KPA) melintasi zona perbatasan *38<sup>th</sup> parallel* untuk menginvasi Korea Selatan pada 25 Juli 1950. Situasi perang yang tidak memungkinkan, mendorong diadakannya perundingan dan gencatan senjata pada 27 Juli 1953, Amerika Serikat, RRC dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan saat itu, Seungman Rhee, menolak menandatangani namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Sehingga situasi perang tersebut belum berakhir sampai dengan saat ini. (Frassminggi, 2014: 23)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Konflik**

Kata konflik mengandung banyak pengertian. Ada pengertian yang negatif, konflik dikaitkan dengan: sifat-sifat kekerasan dan penghancuran. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa: hal-hal baru, pertumbuhan,

perkembangan, dan perubahan. Sedangkan dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai: akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang tidak sama. (Kartini Kartono, 1998: 213)

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu konflik diidentikkan dengan tindakan kekerasan. (Soerjono Soekanto, 1992: 86)

## **B. Konsep Konflik Internasional**

Jika di tinjau dari penjelasan teori konflik di atas, maka konflik internasional sebagai sebuah pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan. Konflik internasional bermula dari konflik antar dua negara karena masalah politik atau ekonomi. Konflik berkembang menjadi konflik internasional karena masing-masing pihak akan mencari sekutu yang memiliki kesamaan visi atau tujuan terhadap masalah yang dipertentangkan. Dengan demikian, terjadilah konflik internasional. Adapun tipologi konflik internasional, antara lain:

1. Krisis Internasional (*international crisis*), krisis yang dimaksud disini seperti adanya hal-hal prinsipil aktor internasional yang sedang terancam, waktu yang sempit sebelum sebuah aksi dieksekusi, sebuah situasi dimana sebagian besar pihak tidak dalam posisiantisipasi, dan sebuah situasi dimana konflik yang diperkirakan terjadi ternyata tidak terwujud.
2. Konflik berintensitas rendah (*Low-Intensity Conflict*), krisis bisa dengan cepat berubah menjadi konflik skala rendah. Konflik skala rendah diukur pada frekuensi atau tingkat kekerasan yang ditimbulkannya.
3. Terorisme (*Terrorism*), terorisme dalam tataran internasional sangat mudah dijumpai karena beberapa alasan. Diantaranya adalah penyebaran senjata yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkannya. Kedua, adalah semakin interdependensinya negara-negara dalam berbagai aspek yang menghubungkan seseorang dengan lainnya. Teroris menggunakan situasi ini untuk melakukan aksinya dengan harapan akan memberi tekanan bagi para penguasa untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Ketiga, kegagalan consensus tentang masa depan komunitas internasional memungkinkan bertumbuhnya paham terorisme. Keempat, penyebab utama adalah revolusi komunikasi. Dengan kemajuan komunikasi yang menggloabal, dampak dari aksi terorisme adalah juga menggloabal.
4. Perang Sipil dan Revolusi (*Civil War and Revolution*). Secara umum, Perang Sipil adalah konflik didalam sebuah negara antar dua atau kelompok yang berperang karena ketidaksepakatan atas masa depan negara. Biasanya, kelompok yang satu diwakili oleh aktor non-negara dan yang lain merupakan aktor negara. Perang Sipil sering memiliki dimensi internasional karena tidak jarang mendapat dukungan dari luar atau karena aktor eksternal berkepentingan dengan hasil perang tersebut. Perang Sipil tidak jarang pula mengarah kepada sebuah Revolusi.
5. Perang Internasional (*International War*), merupakan konflik antara negara-negara yang dijalankan oleh angkatan bersenjata mereka. (Berk, 2007:498-509)

### **C. Konsep Penyelesaian Konflik Internasional**

Penyelesaian konflik Korea, yang digunakan dalam tulisan ini adalah landasan yang tercantum dalam buku *Hukum dan Hubungan Internasional* yang di tuliskan oleh Jawahir Tontowi (2016: 225-248) yaitu penyelesaian konflik secara diplomasi terkait penyelesaian sengketa internasional yang tercantum dalam Piagam PBB, Bab VI, pasal 33, yaitu :

- a. Negosiasi (perundingan)
- b. Penyelidikan (*Enquiry*)
- c. Mediasi (*Mediation*)
- d. Konsiliasi (*Consiliation*)
- e. Arbitrasi (*arbitration*)
- f. Peradilan Internasional (*The International Court of Justice*)

### **D. Konsep Aliansi**

Aliansi didefinisikan sebagai hubungan kerja sama keamanan yang dapat bersifat formal atau informal antara dua atau lebih negara berdaulat. Dalam kamus besar bahasa indonesia, aliansi adalah ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik. Sedangkan menurut Patricia Weitsman, aliansi adalah perjanjian bilateral atau multilateral untuk menyediakan beberapa unsur keamanan untuk penandatanganan. (2004: 27)

Menurut Goldstein, aliansi adalah sebuah koalisi Negara-negara yang mengkoordinasikan tindakan mereka untuk sejumlah tujuan tertentu. Aliansi secara umum memiliki tujuan untuk menambah kekuasaan relatif para anggotanya terhadap Negara-negara lain. Dengan memiliki kapabilitas yang lebih besar, maka akan mempengaruhi posisi tawar Negara anggota dengan Negara lainnya. Bagi Negara kecil, aliansi dapat dijadikan elemen kekuasaan yang penting. Sedangkan bagi Negara besar, struktur aliansi dapat membentuk konfigurasi kekuasaan dalam system. Kebanyakan aliansi di bentuk untuk merespon adanya ancaman. Ketika kekuatan sebuah negara meningkat dan mengancam saingannya, maka akan di bentuk sebuah aliansi untuk membatasi peningkatan kekuatan Negara tadi. (Goldstein, 2004: 102) Aliansi dapat bersifat bilateral maupun multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau sangat terorganisir, dapat berjangka lama atau pendek, serta dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan sebuah perang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dengan mengungkapkan masalah yang ada, mengolah data, menganalisis, meneliti, menginterpretasikan serta membuat kesimpulan. Desain penelitian ini melakukan telaah di sejumlah literatur (*library research*) yaitu metode berbasis kepustakaan dengan pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode berbasis internet, dimanfaatkan untuk mengakses materi ilmiah tradisional (seperti artikel, jurnal ilmiah dan buku), juga dapat dioptimalkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prospek Penyelesaian Konflik Korea Utara dan Korea Selatan**

1. Perjanjian dan Kerja Sama Bilateral Antara Korea (*Inter-Korean Summit Meeting*)

### a. Pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea 13-15 Juni 2000

Selama dalam ketegangan konflik, Korea Selatan menerapkan kebijakan berorientasi ekspor yang diatur negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dimulai pada awal 1960 ketika kebijakan pemerintah bergeser dari Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) menjadi fokus kepada ekspor. Pada akhir 1980-an, beberapa perusahaan termasuk Samsung, Hyundai, dan LG tumbuh menjadi perusahaan global dibawah kebijakan yang mengutamakan ekspor yang berlanjut hingga awal 1990-an.

Sedangkan Korea Utara lebih memprioritaskan pada kepentingan militer dibandingkan kebutuhan rakyatnya. Korea Utara sering kali mengalami kekurangan makanan dan kelaparan hingga menyebabkan tingginya tingkat kematian penduduk di Korea Utara. Tak heran jika Korea Utara sering meminta bantuan dari Luar negeri tak terkecuali dari Korea Selatan. (Aji : 2015)

Keadaan Korea Utara yang semakin memprihatinkan, membuat Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung berusaha terus untuk membujuk Kim Jong-Il menerima kebijakannya untuk mencapai reunifikasi. Upaya Kim Dae Jung mewujudkan penyatuan kembali kedua Korea dalam berbagai forum internasional, seperti saat tampil dalam *APEC Forum on Shared Prosperity and Harmony di Seoul*. Dalam kunjungannya ke Jerman pada bulan Maret 2000, melalui Deklarasi Berlin Kim menyerukan pihak Pyongyang agar mulai mengembangkan kembali dialog langsung dengan Seoul. (Dessy. F, 2013: 7). Sehingga pada tanggal 8 April 2000 terjadinya kesepakatan untuk di selenggarakannya Konfrensi Tingkat Tinggi Antar-Korea (*Inter-Korean Summit Meeting*) yang pertama kali pada tanggal 13-15 Juli 2000 di kota Pyongyang, Korea Utara

**Tabel 1: Hasil Konfrensi Tingkat Tinggi Antar-Korea 2000**

<i>Masalah keluarga terpisah</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reuni keluarga terpisah antar Korea</li><li>• Pembukaan tempat reuni bagi keluarga terpisah (masih menghadapi hambatan)</li></ul>
<i>Perwujudan hubungan kerjasama ekonomi antar Korea</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proyek kompleks Industri Korea Selatan di kota Gaesong Korea Utara</li><li>• Proyek penyambungan rel kereta api jalur Kyonggeui dan Donghae dan jalan darat antar Korea</li><li>• Proyek hubungan kerjasama industri ringan dan sumber daya alam antar Korea</li></ul>
<i>Dialog langsung antar Korea</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertemuan tingkat menteri (mengadakan 21 kali pertemuan secara rutin hingga awal Juni 2007 lalu)</li><li>• Komisi Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Ekonomi antar Korea (membahas dan melaksanakan berbagai proyek ekonomi antar Korea secara nyata)</li><li>• Pertemuan militer (Pertemuan militer tingkat kerja, pertemuan militer tingkat perwira tinggi, dan pertemuan menteri pertahanan selama ini berhasil meningkatkan rasa saling percaya)</li></ul>

Sumber: [world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit\\_2000.htm?lang=i](http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2000.htm?lang=i)

Namun hubungan kedua Negara mengalami tantangan dengan adanya isu terorisme internasional dan rejim Korea Utara dilibatkan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan George W. Bush sebagai Negara anggota “poros setan” (*Axis of Evil States*) dan Korea Utara dimasukkan sebagai salah satu Negara yang dimungkinkan sebagai sasaran penyerangan oleh Amerika Serikat. (James T. Leni, 2003: 28) hal tersebut terjadi karena disebabkan tuduhan kepada Korut membuat program pengayaan uranium dan telah melanggar perjanjian *Inter-Korean Summit Meeting* pada bulan Juni 2000 dan *six party talk* pada bulan April 2003. Sehingga setelahnya, terjadi kembali krisis nuklir untuk kedua kalinya setelah krisis nuklir tahun 1994.

#### **b. Pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea 4 Oktober 2007**

Deklarasi Bersama antar Korea yang ditanda tangani oleh presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada 4 Oktober 2007 mencantumkan hasil pertemuan puncak kedua pemimpin itu. Deklarasi Bersama 4 Oktober terdiri atas 8 pasal dan dua pasal tambahan.

***Tabel 2: Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea 2007***

<i>Implimentasi Deklarasi bersama 15 Juni</i>	- Penuntasan masalah unifikasi secara independen - Implimentasi dan peringatan Deklarasi Bersama 15 Juni
<i>Hubungan antarKorea yang saling hormat dan percaya</i>	- Tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain - Melakukan perubahan undang-undang dan sistem kebijakan dalam rangka mengembangkan hubungan antarKorea berorientasi pada unifikasi - Promosi dialog di berbagai bidang termasuk parlemen
<i>Peredaan ketegangan militer</i>	- Kerjasama erat untuk mengakhiri permusuhan militer, meredakan ketegangan dan menjamin perdamaian di semenanjung Korea - Menolak perang apapun di semenanjung dan menaati perjanjian non-agresi - Mengadakan pertemuan menteri pertahanan antar Korea di Pyongyang pada bulan Nopember guna membahas penetapan zona penangkapan ikan bersama dan mengubahnya menjadi zona perdamaian, dan membahas masalah pembangunan kepercayaan militer untuk mewujudkan tujuan itu.
<i>Pengakhiran gencatan senjata dan pembangunan perdamaian secara permanen</i>	- Mendorong pertemuan 3 atau 4 pemimpin negara yang terlibat dalam masalah semenanjung untuk mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea - Berupaya untuk memperlancar implimentasi ‘Pernyataan Bersama 18 September’ dan ‘Persetujuan 13 Februari’ guna menuntaskan masalah nuklir di semenanjung Korea
<i>Kerjasama ekonomi</i>	- Dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi berimbang dan kemakmuran bersama disemenanjung Korea, kedua belah pihak mengaktifkan proyek kerjasama ekonomi antarKoreadengan basis

	<p>berkesinambungan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kemakmuran bersama dan saling membantu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumberdaya alam, serta memberikan syarat prioritas dan lebih banyak keuntungan dalam proyek.</li> <li>- Penetapan 'zona perdamaian dan kerjasama khusus di Laut Barat' di daerah Haeju dan di sekitarnya, pembentukan zona penangkapan ikan bersama, pembangunan zona ekonomi khusus, penggunaan pelabuhan Haeju, pembukaan jalur pelayaran langsung melalui Haeju serta penggunaan bersama muara sungai Han.</li> <li>- Peluncuran proyek pembangunan tahap kedua Taman Industri Gaesung</li> <li>- Pembukaan layanan kereta barang antara Munsan dan Bongdong</li> <li>- Penyelesaian berbagai tindakan institusional, termasuk hal-hal yang terkait urusan imigrasi, komunikasi dan prosedur bea cukai</li> <li>- Pembahasan perbaikan jalur rel antara Gaesung-Shineuiju dan jalan raya Gaesung-Pyeongyang untuk penggunaan bersama jalur tersebut.</li> <li>- Pembangunan kompleks kerjasama galangan kapal di Anbyeon dan Nampo</li> <li>- Melanjutkan proyek kerjasama di bidang pertanian, kesehatan dan jasa medis serta perlindungan lingkungan hidup</li> <li>- Mengangkat status 'Komite Pelaksana Kerjasama Ekonomi antar Korea' yang telah ada dengan 'Komite Bersama untuk Kerjasama Ekonomi antar Korea' yang dipimpin oleh pejabat tingkat Wakil Perdana Menteri.</li> </ul>
<p><i>Pertukaran dan kerjasama di sektor sosial dan budaya</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertukaran dan kerjasama di bidang sosial-budaya yang mencakup sejarah, bahasa, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan olahraga</li> <li>- Melakukan program pariwisata gunung Baekdu dan pembukaan layanan penerbangan langsung antara Seoul dan gunung Baekdu untuk tujuan wisata itu.</li> <li>- Pengiriman suporter bersama ke Olimpiade Baeijing 2008 lewat jalur kereta Gyengeui</li> </ul>
<p><i>Kerjasama kemanusiaan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan reuni anggota keluarga terpisah dan sanak saudaranya serta mempromosikan pertukaran pesan lewat video (korespondensi video) antarKorea.</li> <li>- Menempatkan perwakilan masing-masing di pusat reuni permanen di gunung Geumgang dan mengadakan reuni secara teratur.</li> <li>- Kerjasama secara aktif dalam keadaan darurat termasuk bencana alam</li> </ul>

---

<i>Peningkatan kerjasama di panggung internasional</i>	-	Kerjasama untuk mempromosikan keharuman bangsa Korea, dan hak warga Korea di luar negeri
--	---	--

---

Sumber: [world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit\\_2007.htm?lang=i](http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2007.htm?lang=i)

Perubahan hubungan yang mulai harmonis antara kedua Korea terjadi pada tahun 2007 akhir. Presiden Lee Myung Bak yang menang dalam pemilihan presiden Korea Selatan pada bulan Desember 2007 menawarkan kebijakan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak tercapainya kata sepakat dalam *six party talk* mendorong Korea Utara meneruskan proyek pengayaan uranium yang kemudian memunculkan tekanan yang dilakukan oleh presiden Korea Selatan terpilih, Lee Myung Bak, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskannya berkenaan dengan bantuan terhadap Korea Utara. Kebijakannya ialah kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan Pyongyang hanya akan mungkin dilaksanakan apabila Korea Utara sepenuhnya menghentikan operasi fasilitas nuklirnya. Kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Kim Dae Jung yang memberikan bantuan tanpa syarat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Lee Myung Bak, menimbulkan reaksi yang sangat menentang dari Korea Utara. Diawali dengan serangan-serangan verbal dari media buruh Korea Utara yang mengecam sikap Lee Myung Bak, hingga Korea Utara memutuskan untuk memperketat perbatasan dan melakukan peluncuran rudal jarak jauh, serta berbagai protes keras lainnya sebagai bentuk menentang kebijakan Korea Selatan. Karna Program Nuklir adalah penting untuk melindungi negara dari ancaman dari ketertinggalannya oleh negara-negara asing.

### **c. Pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea 27 April 2018**

Bagi beberapa kalangan, Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom yang bersejarah antara Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un bukan hal yang mengejutkan dan merupakan pengulangan dari Pertemuan Tingkat Tinggi antar-Korea sebelumnya yang dilaksanakan pada 2000 dan 2007. Namun demikian, ada pula beberapa perbedaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi tahun 2018 dengan tahun 2000 dan 2007.

*Pertama*, dalam hal waktu pelaksanaan. Presiden Moon telah belajar dari pertemuan pendahulunya Roh Moo-Hyun dengan Kim Jong-il tahun 2007 yang dilaksanakan di akhir masa jabatan Presiden Korsel. Presiden Roh, pada akhirnya tidak dapat menyaksikan implementasi dari resolusi pertemuan tahun 2007. Sementara Presiden Moon, telah menyiapkan proses antara Korea yang dapat diimplementasikan dalam kurun waktu empat tahun masa jabatannya. Pihak oposisi Moon mengkritisi bahwa mengingat perolehan suaranya dalam pemilu presiden 2017, Moon kurang memiliki mandat untuk mengimplementasikan kebijakannya dalam aksi nyata. Namun demikian, hasil survei opini publik yang dilaksanakan pasca Pertemuan Tingkat Tinggi April 2018 justru mematahkan kritik tersebut dan menunjukkan 90% warga Korsel mendukung Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom sekaligus mendukung langkah Presiden Moon. *Kedua*, dalam hal tingkat ancaman nuklir dan rudal balistik Korut yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam dua Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya, ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, tidak memiliki senjata yang cukup untuk mengancam AS dan

dapat melemahkan aliansi AS-Korsel. Namun, dimasa Kim Jong-un, Korut memiliki persenjataan yang dapat digunakan untuk mengancam AS dan digambarkan olehnya sebagai “pedang keadilan yang bernilai”.

## 2. Perjanjian dan Kerja Sama Multilateral ( *six party talk* )

Keberhasilan dalam sejarah atas pertemuan antara pimpinan Negara pada KTT tahun 2000 yang pertama kali, menjadi peluang besar untuk pertemuan selanjutnya untuk memajukan ekonomi kedua Korea. Akan tetapi pembangunan dan perkembangan nuklir Korea Utara yang telah dibangun sejak 1959, mendorong Korea Utara untuk melakukan peluncuran uji coba program nuklir yang selama ini dikedembangkan negara tersebut. Karna sebagai Negara produksi nuklir, Korea utara terpaksa ikut terlibat dalam Perjanjian *Non-proliferasi Nuklir* (NPT) pada 12 Desember 1985. NPT merupakan suatu perjanjian yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Dengan masuknya Korea Utara ke dalam NPT, maka mewajibkan Korea Utara melakukan proses denuklirisasi, yaitu proses terwujudnya penghapusan kepemilikan senjata nuklir. Pada tahun 2003, Korea Utara dilaporkan mengerahkan produksi hampir 100 rudal Nodong. Akhirnya Korea Utara mengeluarkan diri dari keanggotaan perjanjian *non-proliferasi nuklir* (NPT) pada 10 Januari 2003. (Nabil, M. 2014: 35)

Keadaan ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas kemandirian di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, pada Agustus 2003 Amerika Serikat (AS) bersama Cina membentuk sebuah pembicaraan multilateral untuk menggandeng kembali Korea Utara ke dalam meja perundingan dengan melibatkan Rusia, Jepang, dan Korea Selatan. Pembicaraan multilateral tersebut yang dikenal dengan nama *Six Party Talks*.

Sebelum *Six Party Talks* dibentuk, Presiden Bush pada awal tahun 2003, mengajukan dibentuknya forum pembicaraan multilateral yang difokuskan membahas isu nuklir Korea Utara melalui jalur diplomatik. Kemudian diselenggarakanlah pertemuan tiga negara yang dikenal dengan forum *Trilateral Talks*, Forum pertemuan tiga negara tersebut melibatkan AS, Cina, Korea Utara pada April 2003 di Beijing. (Mun. 2009: 118)

**Tabel 3: Hasil Pencapaian dalam Six Party Talks**

Nama Perjanjian	Poin-Poin Penting
<i>Joint Statement on September 19, 2005</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembongkaran program nuklir Korea Utara dan Penghapusan Fokus Keamanan Korea               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korea Utara berkomitmen untuk meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir yang ada.</li> <li>- AS menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki senjata nuklir di Semenanjung Korea dan tidak memiliki niat untuk menyerang atau menginvasi Korea Utara.</li> <li>- Korea Utara menyatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk 57 Joint Statement on September 19, 2005 menggunakan energi nuklir secara damai.</li> </ul> </li> <li>• Normalisasi Hubungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- AS dan Korea Utara berjanji akan menghormati kedaulatan masing-masing, hidup bersama secara damai, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan mereka.</li> <li>- Korea Utara dan Jepang mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan mereka.</li> </ul> </li> </ul>

---

*Agreement on  
February 13, 2007*

- Bantuan Internasional untuk Korea Utara
    - Keenam pihak berusaha meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang energi, perdagangan, dan investasi.
    - Cina, Jepang, Korea Selatan, Rusia dan AS menyatakan keinginannya menyediakan bantuan energi untuk Korea Utara
  - Visi Perdamaian dan Stabilitas di Semenanjung Korea dan Asia Timur
    - Para pihak yang terkait secara langsung akan menegosiasikan rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea pada sebuah forum terpisah yang sesuai.
    - Enam pihak sepakat untuk mengeksplorasi cara dan sarana untuk meningkatkan kerjasama keamanan di Asia Timur.
  - Prinsip-prinsip untuk Implementasi
    - Enam pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah terkoordinasi untuk melaksanakan konsensus tersebut secara bertahap sesuai dengan prinsip “komitmen per komitmen” dan “tindakan per tindakan”
- 
- Rencana Aksi untuk Tahap Awal: Dalam 60 hari pertama.
    - Korea Utara akan menutup dan menyegel fasilitas nuklir yang ada, termasuk fasilitas pemrosesan kembali, dan mengundang kembali para pemeriksa IAEA.
    - Korea Utara akan mendiskusikan dengan pihak lain mengenai daftar semua program nuklir Korea Utara.
    - Korea Utara dan AS akan memulai pembicaraan bilateral yang bertujuan untuk bergerak menuju hubungan diplomatik penuh. AS akan mulai memproses mengeluarkan penetapan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme dan mengakhiri penerapan “*Trading with Enemy Act*” dengan menghormati Korea Utara.
    - Korea Utara dan Jepang akan memulai kembali pembicaraan bilateral yang bertujuan untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan mereka.
    - Semua pihak setuju untuk pemberian bantuan energi darurat setara dengan 50.000 ton bahan bakar minyak berat ke Korea Utara.
  - Pembentukan Kelompok Kerja Lima: Pertemuan Pertama Kelompok Kerja dalam waktu 30 hari ke depan
    - Denuklirisasi Semenanjung Korea, Normalisasi Hubungan Korea Utara-AS, Normalisasi Hubungan Korea Utara-Jepang, Kerjasama energi dan ekonomi, Perdamaian dan mekanisme keamanan Asia Timur Laut.
  - Rencana Aksi untuk Tahap berikutnya: Setelah penyelesaian tahap awal.
    - Korea Utara akan membuat deklarasi lengkap semua program nuklir dan mematikan semua fasilitas nuklir yang ada.
-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pihak lain akan memberikan energi, ekonomi, dan bantuan kemanusiaan setara dengan 950.000 ton bahan bakar minyak berat kepada Korea Utara.</li> <li>• Pertemuan tingkat Menteri: Setelah penyelesaian tahap awal.</li> <li>• Rezim perdamaian di Semenanjung Korea: Para pihak yang terkait langsung akan menegosiasikan rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea pada Forum terpisah yang sesuai.</li> </ul>
<i>Agreement on October 3, 2007</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korea Utara setuju untuk me non-aktifkan semua fasilitas nuklir yang ada pada ahir tahun.</li> <li>• Korea Utara setuju untuk mengumumkan semua program nuklirnya pada akhir tahun.</li> <li>• Korea Utara menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mentransfer bahan nuklir, teknologi, atau keterampilannya.</li> <li>• AS akan memulai proses mengeluarkan penetapan Korea Utara sebagai negara pendukung terorisme.</li> <li>• AS akan meningkatkan proses mengakhiri penerapan perdagangan dengan Enemy Act sehubungan dengan Korea Utara.</li> <li>• AS dan Jepang akan membuat upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.</li> <li>• Kelima pihak akan memberikan energi, bantuan ekonomi, serta bantuan keman</li> </ul>

*Sumber: Dong-So, Kim, Park Kap-So, dkk. Understanding North Korea. 2012. Seoul: Ministry of Unification.*

Meski telah dibentuk lembaga atau instrumen Internasional yang memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang telah digelar empat putaran sejak dibentuk tahun 2003, namun forum internasional ini tidak efektif untuk mengkomodasi konflik di Semenanjung Korea.

Dalam kesepakatannya pada tanggal 13 Februari 2003, Korea Utara setuju untuk menutupi reaktor Yongbyon dalam waktu 60 hari dengan imbalan akan mendapat bantuan. Namun Korut gagal menepati janji. Ketegangan pun semakin menjadi setelah AS manaruh kecurigaan kepada Korut yang mengembangkan kembali program nuklir rahasia yang kaya uranium. Bantuan oleh Korsel dan AS 500.000 ton BBM pengganti energy nuklir ke Korut diberhentikan. Korut kemudian menanggapi dengan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklir PBB di Yongbyon, pusat pengembangan nuklir di Korut, dan diikuti dengan perginya semua personil inspeksi nuklir PBB meninggalkan Korea Utara. (Lilis.W, 2012: 66) Pada tahun 2009, Korut akhirnya memutuskan tidak akan berkomitmen lagi pada forum multilateral (*Six Party Talks*) ini. (Mohamad Rosyidin, 2012: 106).

### **3. Konfrensi Tingkat Tinggi Korea Utara - Amerika Serikat (Donald Trump) dan Sanksi internasional**

Berbagai upaya untuk melakukan denuklirisasi telah banyak dilakukan, namun dunia masih menantikan formulasi yang tepat untuk menemukan strategi yang tepat guna menghindari ancaman senjata nuklir Korut. Stabilitas keamanan kawasan menjadi

hal yang dipertaruhkan ketika dalam lebih dari satu dekade terakhir sejak 2006-2017 telah terjadi beberapa uji coba senjata nuklir Korut.

Bagi Korut, keberadaan militer AS dan beberapa negara aliansinya di kawasan merupakan sumber ancaman utama. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas militer, termasuk di dalamnya senjata nuklir merupakan jalan yang harus ditempuh untuk tetap mempertahankan eksistensi Korut. Selain digunakan sebagai strategi *deterrence*, Korut juga menggunakan senjata nuklir sebagai *bargaining position* dalam berdiplomasi dengan dunia internasional. (Mansourov, 1995: 50) Kedudukan Amerika Serikat berada paling terdepan dalam konflik antara Korea untuk melindungi sekutunya atas ancaman nuklir Korea Utara. Sehingga sewaktu-waktu Korea Utara dapat melulantahkan Korea Selatan dengan nuklirnya. Menjadi terdepan karna sekutunya yang merasa terancam atas keberadaan nuklir Korut dan dengan kekuatan *super power* dibidang ekonomi dan militer, Amerika Serikat biasa menekan siapa saja yang menjadi ancaman bagi sekutunya dengan embargo ekonomi ataupun intervensi militer. Sehingga keberadaan Amerika menjadi ancaman sebaliknya bagi Korut.

Uji coba rudal nuklir semenjak tahun 2006 hingga 2017, terhitung sebanyak 6 kali. Terhitung semenjak bulan Oktober 2006, April 2012, Februari 2013, Januari 2016, September 2016, dan pada September 2017 uji coba bom hidrogrn berkekuatan 20-30 ton dengan hasil guncangan 6,3 skala richter (SK). Waktu yang bersamaan Korut dijatuhi sanksi internasional oleh Dewan Keamanan PBB, yaitu:

1. 14 Oktober 2006 (*Resolusi 1718*)  
Resolusi ini juga mengharuskan Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara. Negara anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir. Sanksi ini diberikan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006.
2. 12 Juni 2009 (*Resolusi 1874*)  
PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lebih lanjut kepada Korea Utara serta mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009.
3. 7 Juni 2010 (*Resolusi 1928*)  
Resolusi PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2011
4. 10 Juni 2011 (*Resolusi 1985*)  
PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2012.
5. 23 Januari 2013 (*Resolusi 2087*)  
Resolusi kali ini sebagai sanksi setelah Korea Utara meluncurkan roket balistik pada 12 Desember 2012. Resolusi ini mengharuskan Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan melepaskan semua senjata nuklir serta program nuklirnya. Selain itu Korea Utara juga tidak diperbolehkan menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau melakukan provokasi.
6. 7 Maret 2013 (*Resolusi 2094*)  
Sanksi kali ini dalam bentuk menghentikan transfer uang dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional. Pemberian sanksi setelah uji coba ketiga nuklir Korea Utara.

7. 2 Maret 2016 (*Resolusi 2270*)  
15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi itu antara lain embargo senjata. Memberi wewenang kepada semua negara untuk melakukan pemeriksaan paksa terhadap kargo dari dan ke Korea Utara yang dikirim baik lewat laut maupun udara. Melarang Korea Utara mengimpor semua produk yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan militer, dan akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal. Setelah sanksi itu Korea Utara menembakkan beberapa proyektil ke arah Laut Jepang.
8. 30 November 2016 (*Resolusi 2320*)  
PBB memberikan sanksi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir kelima yang dilakukan Pyongyang pada bulan September.
9. 6 Agustus 2017  
15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara uji coba rudal balistik antar benua atau rudal ICBM pada Juli lalu. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang oleh Amerika Serikat itu melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara. Selain itu anggota PBB juga dilarang meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya, melarang usaha.

Akibat sanksi ini diperkirakan akan memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korea Utara, yakni US\$ 3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun. (Tempo.co 2017)

Sehingga perjanjian dan kerja sama ekonomi antara Korea akan terlaksana hingga dicabutnya sanksi internasional terhadap Korea Utara. Dimana AS sangat berpengaruh dalam sanksi internasional yang diberikan kepada Korea Utara, terlebih sanksi embargo ekonomi Korea Utara pada tahun 2006 hingga 2017 dikarenakan pada tahun tersebut terhitung 6 kali peluncuran uji coba nuklir. KTT antara Korea pada 27 April 2018 yang melatar belakangi terjadinya Konferensi Tingkat Tinggi antara Amerika Serikat dengan Korea Utara, yaitu bertemunya antara kedua pimpinan Negara Korea Utara, Kim Jong-Un dan Amerika Serikat, Donal Trump. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Singapur pada tanggal 20 Juni 2018 dan di Vietnam pada 27-2 Februari 2019. Isu denuklirisasi dan Sanksi atas Korea Utara menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Dalam penyampaian Trump didepan media mengatakan 'Kim sepakat untuk menghancurkan 'situs uji coba mesin rudal utama. Namun enggan mencabut sanksi ekonomi yang diberikan kepada Korut. (bbc.com 2018)

Pengalaman sejarah, setiap perjanjian yang telah di buat selalu di langgar oleh Korea Utara dengan tetap produksi dan uji coba nuklir untuk menjaga negaranya dari serangan lawan musuhnya. Di satu sisi, produksi dan uji coba nuklir selalu mendapat kecaman dan sanksi internasional. Sanksi tersebut menambah memicu kemarahan Korut untuk tetap meningkatkan produksi nuklir dan uji coba. Sehingga perdamaian di semenanjung korea hanya akan menjadi impian belaka tanpa realita.

## **PENUTUP**

Konflik Korea Utara dan Korea Selatan telah berlangsung selama 65 tahun. Denuklirisasi menjadi pokok utama permasalahan yang hingga kini belum menemui titik terang dari berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian antara kedua Korea.

Dalam perjalanannya konflik yang dilatari belakang oleh dua ideologi besar, yaitu: sosialis - komunis dan kapitalis - demokarasi yang hingga kini telah menjelma sebagai kepentingan besar Amerika Serikat untuk mempertahankan daerah kekuasaannya (sekutu) di wilayah Pasifik, sementara di sisi lain Cina yang sebagai Negara sosialis – komunis, kini menjadi Negara *super power* setelah Amerika Serikat melebihi kekuatan Rusia, sehingga memainkan peran yang sama seperti AS di wilayah pasifik dengan membantu Korea Utara yang langsung berbatasan dengannya untuk menghadang pengaruh atau ancaman Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah pasifik melalui Korea Selatan, telah menjadikan konflik Korea semakin rumit. Bahkan menjadi sebaliknya, masa depan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan terlihat akan tetap dalam kondisi konflik dan sangat berpeluang untuk pecah kembali perang besar antara kedua Korea. Hal tersebut di karenakan Korea Utara telah memiliki senjata pemusnah masal antara benua yang membuatnya tidak takut dan tunduk kepada siapapun. Produk nuklir Korut hingga kini tidak dapat diinterfensi dan diberhentikan sekalipun ancaman dan sangsi bertubi-tubi di jatuhkan kepada Korut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anisa, S. 2017. *Sejarah Asia Timur : Dari masa pradaban kuno hingga modern*. Yogyakarta : Penerbit Socuality.
- Djelantik, S. 2015. *Asia Pasifik : konflik, kerja sama, dan relasi antarkawasan*. Jakarta : Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Fisher S et. al. 2001. *"Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak"*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra. Terjemahan dari: Working with Conflict: Skills and Strategies for Action . UK: Zed Books Ltd.
- Herianto. 2006. Teori Prospek dan Pembuatan Keputusan: Suatu Studi Empiris untuk Kasus Indonesia. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol 6 No1.
- Hart, L. M. 1998. *Korea: Division Reunification & U.S Foreign Pilicy*. New york : Monhly Review pwerss
- Indriana, K. 2018. Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong Un. *Jurnal Politik LIPI*. Vol.15, No.1.
- Irawan, S. 2017. Reformasi aliansi pertahanan AS, Jepang dan Korea Selatan menghadapi ancaman Nuklir Korea Utara. *Jurnal International & Diplomacy*. Vol. 3, No. 1
- Irsan, A. 2007. *Budaya dan perilaku politik Jepang di Asia*. Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu.
- Jemadu, A. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kamasa, F. 2014. *Perang Korea*. Yogyakarta : Pustaka Narasi.
- Lisbet. 2018. Dialog Korea Selatan-Korea Utara dan dampak terhadap keamnan kawasan. *Artikel Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI*. Vol. X, No. 02.
- Lubis, M. 2010. *Catatan Perang Korea*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhamad, S. V. 2018. Perdamaian di Semenanjung Korea Pasca-Pertemuan Moon Jae-In dan Kim Jong-Un. *Jurnal Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI*. Vol. X, No. 09
- Mas'oeid, M dan Yoon, Y. S. 2005. *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: UGM Press.
- Michael, E. R. 2007. *Korea's Twentieth-Century Odyssey*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Raisamaili, T. 2011. *Konflik Korea Utara Korea Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Syahrin, N.M. 2018. Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalita Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara. *Journal of International Studies*. Volume 2, No. 1
- Scalapino, R. A dan Sato, S. 1990. *Masalah Keamanan Asia*. Jakarta: (penyunting), Jusuf Wanandi.
- Surwandono, S. A. 2011. *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thontowi, J. 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta : UII Press.
- Walter, S. P. 1993. *Logika hubungan internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan tatanan Dunia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yang, S. Y dan Mohtar. M. 2005. *Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yang, S. Y dan Setiawati N. A. 2003. *Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sumber Lain :
- <http://www.hariansejarah.id/2017/02/perang-dingin-1947-1991-persaingan-liberalisme-dan-komunisme.html?m=1>
- A Brief History of the U.S-ROK Alliance and Anti-Americanism in south korea  
[http://iss-db.stanford.edu/pubs/22961/Kim-Hakakjoon\\_FINAL\\_May\\_2010](http://iss-db.stanford.edu/pubs/22961/Kim-Hakakjoon_FINAL_May_2010)
- [https://www.academia.edu/27619429/TERJADINYA\\_PERANG\\_KOREA\\_1950\\_1953\\_DAN\\_HUBUNGAN\\_KOREA\\_UTARA\\_DAN\\_KOREA\\_SELATAN\\_HINGGA\\_2013](https://www.academia.edu/27619429/TERJADINYA_PERANG_KOREA_1950_1953_DAN_HUBUNGAN_KOREA_UTARA_DAN_KOREA_SELATAN_HINGGA_2013)
- [www.usinfo.state.gov/xarchives/display.html](http://www.usinfo.state.gov/xarchives/display.html), diakses 12 April 2006).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/KTT\\_Antar-Korea\\_2018](https://id.wikipedia.org/wiki/KTT_Antar-Korea_2018)
- <https://www.kemlu.go.id/pyongyang/en/Pages/Korea-Utara.aspx>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41399234>
- <https://news.detik.com/dw/d-4204942/korea-utara-tak-ada-kemajuan-dalam-upaya-penyelesaian-konflik>
- <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-x-tahap-permulaan-dari-berakhirnya-perang-korea/>
- <https://sport.tempo.co/read/1058422/olimpiade-musim-dingin-korea-utara-didominasi-pemandu-sorak/full&view=ok>
- [https://www.kompasiana.com/anugrah\\_rahmatulloh/5a82c9b0f1334448430343e4/winter-olympic-2018-pyeongchang-bagaimana-olahraga-menyatukan-korea?page=all](https://www.kompasiana.com/anugrah_rahmatulloh/5a82c9b0f1334448430343e4/winter-olympic-2018-pyeongchang-bagaimana-olahraga-menyatukan-korea?page=all)